

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN DI PULAU SULAWESI**

TAHUN 2015-2018

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



MUHAMMAD RIZKY

3118 30628

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA
PAHLAWAN YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN DI PULAU SULAWESI TAHUN 2015-2018

Dipersiapkan dan disusun oleh:

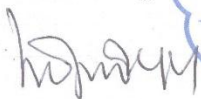
MUHAMMAD RIZKY

No Induk Mahasiswa: 311830628

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 21 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing 1



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Pembimbing 2



Fachmi Pachlevi Yandra, SE., M.Sc., Ak.

Penguji



Astuti Purnamawati, Dra., M.Si.

Yogyakarta, 21 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



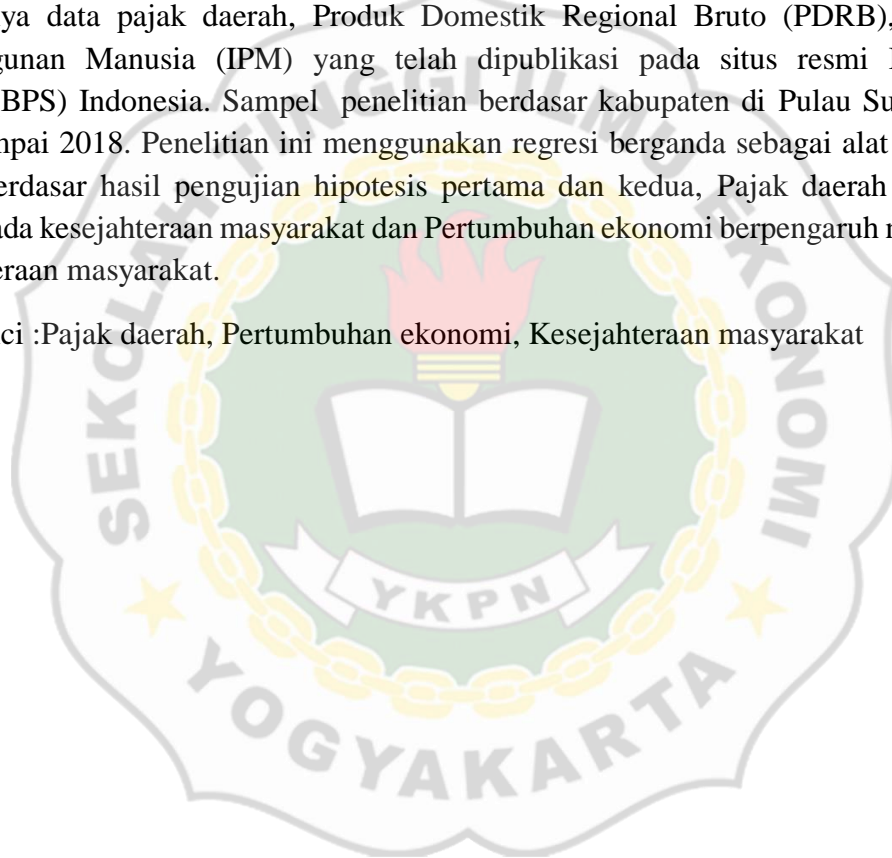

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Pulau Sulawesi. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan jumlah pajak daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat diukur dengan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan *non random sampling* dengan kriteria tersedianya data pajak daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dipublikasi pada situs resmi Badan Pusat Statistik(BPS) Indonesia. Sampel penelitian berdasar kabupaten di Pulau Sulawesi tahun 2015 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis ($\alpha = 0,05$). Berdasar hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua, Pajak daerah berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci :Pajak daerah, Pertumbuhan ekonomi, Kesejahteraan masyarakat



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dipahami sebagai keadaan tercukupinya kebutuhan sosial, spiritual, dan material khalayak luas dalam kelayakan hidup serta kemampuan pembawaan diri untuk bisa memenuhi fungsinya secara sosial dalam UU/No.11/2009. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan dengan kemakmuran, kebahagiaan, kebebasan, dan kesiapan mengenai hal yang sedang terjadi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Cigna Corporation pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan peringkat 14 di indeks kesejahteraan global. Kemakmuran dan kebahagiaan suatu masyarakat bisa dilihat dan diukur dengan banyak faktor.

Masyarakat yang sejahtera bisa diukur salah satunya dengan melihat kondisi perekonomian suatu negara secara makro maupun mikro. Tingkat pendapatan pun bisa digunakan sebagai pengukur kesejahteraan masyarakat, artinya jika pendapatan masyarakat tinggi maka masyarakat akan lebih sejahtera, karena dapat dianggap pihak masyarakat memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Djoyohadikusumo (1994) berpandangan bahwasanya pemahaman dari pertumbuhan ekonomi ialah serangkaian kejadian pertambahan atas penghasilan jasa/barang pada tiap kegiatan ekonomi di lingkungan kemasyarakatan.

Penting untuk setiap daerah dalam meningkatkan pertumbuhannya, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Saragih (2018) menganalisis tentang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan kausalitas, artinya saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil penelitian tersebut adalah penerimaan pajak di suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) adalah kondisi ketika pajak yang seharusnya terutang, terkena sanksi administrasi perpajakan atau denda dan sanksi pidana di bidang perpajakan dihapus atau diampuni oleh pemerintah sebagai pihak berwajib. Pemerintah melakukan amnesti pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak serta kepatuhan pajak. Bertambahnya penerimaan pajak akan membuat pemerintah memiliki kemampuan belanja semakin besar sehingga bisa membantu program pembangunan secara infrastruktur dan juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, perihal pengaruh pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sangatlah menarik bagi peneliti untuk diteliti pada kajian bertajuk **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kesejahteraan Masyarakat”**

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Penafsiran tersebut membuktikan bahwa didalam teori keagenan terdapat 2 pihak yang terlibat, pihak yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melaksanakan pendelegasian wewenang sering diucap *principal*, dan pihak yang diberikan wewenang serta mempunyai hak buat melaksanakan pengambilan keputusan merupakan agen.

Pada pemerintahan yang dinamakan agen yaitu pemerintah itu sendiri sedangkan rakyat disebut dengan prinsipal. Rakyat menunjuk pemerintah sebagai agen yang harus mengabdikan untuk rakyat, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan kewajiban sesuai dengan UU yang ada sebagai tanggungjawab utamanya (Nurdiono *et al.*, 2016). Dalam hubungan prinsipal dan agen merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan keuangan negara.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional atau GDP (Gross Domestic Product) atau GNP (Gross National Product) tanpa memperhatikan perubahan dari GNP/GDP atau struktur ekonom. Umumnya pada negara maju kejelasan kondisi perkembangan ekonominya akan dijelaskan pada pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Smith (1776) mengeluarkan pernyataan berkenaan sistematika dalam proses pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu yang panjang. Pertumbuhan keseluruhan *output* dan pertumbuhan penduduk dalam pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai pokok subjek. Diantara pokok unsur yang didapati pada pertumbuhan keseluruhan *output* total ialah stok barang modal, jumlah penduduk (SDM), dan sumber daya alam.

Sumber daya alam ialah bagian fundamental dalam aktivitas produksi masyarakat. Sumber daya jenis ini merupakan kekayaan yang digunakan sebagai faktor pada proses produksi. Termasuk pada golongannya ialah material mentah, tanah dan air. Batasan ketersediaan pada sumber daya alam menjadi ambang maksimal pada pertumbuhan ekonomi, manakala belum sepenuhnya dimanfaatkan persediaannya maka akan didapati peranan stok barang modal serta total penduduk pada pertumbuhan *output*. Selanjutnya, bilamana telah dicapai ambang maksimal pemanfaatan sumber daya alam maka dimungkinkan atas kejadian terhentinya Pertumbuhan.

Pada pertumbuhan *output* peran pasif dimainkan oleh jumlah penduduk, karenanya dalam perekonomian, pada taraf kebutuhan tenaga kerja, akan menyesuaikan diri jumlah penduduknya. Kala tingkat upah subsisten berada pada posisi lebih rendah dibanding taraf upah berlaku, maka akan meningkat pula jumlah penduduk. Sementara itu, taraf upah berlaku akan ditentukan oleh penawaran dan kekuatan permintaan pasar tenaga kerja. Pertumbuhan yang lebih lambat pada penawaran tenaga kerja bila berbanding kebutuhan tenaga kerja akan berujung pada peningkatan ketinggian upah. Selanjutnya, tingkatan stok modal dan *output* masyarakat akan menentukan besaran kebutuhan tenaga kerja. Karenanya, laju pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal dan *output* masyarakat (Arsyad, 2010).

Teori Kesejahteraan Masyarakat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Umumnya, digolongkan menjadi tiga jenis pada kategori teori kesejahteraan dalam teorinya, yakni new contractarian approach, neoclassical welfare theory, dan classical utilitarian (Sudarsono, 1982). Pada Classical utilitarian ditekankan bahwasanya rasa puas individu setiap saat mengalami pertambahan dan terukur. Dimana secara kuantitatif, dapat dibandingkan tingkatan kepuasan pada setiap orang. Lanjut, Neoclassical welfare lebih berfokus pada kaidah yang dipahami selaku kedudukan di mana tiada potensi bagi pemberlakuan pengalokasian kembali output ataupun input (pareto optimality) yang menjadi penyebab terhindarnya keburukan pada lain individu dengan pertambahan kebaikan pada individu lainnya. Sementara, New contractarian approach melakukan penekanan terhadap konsep di mana setiap orang mendapatkan hak untuk bebas secara maksimum dalam hidup. Ketiga pandangan tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepuasan individu mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat tercapai dengan meningkatkan tingkat kepuasan berdasar sumber daya yang dimiliki.

Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasar pemahaman ini, bisa dikatakan pajak adalah pemberian yang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara. Rakyat yang diwajibkan untuk membayar pajak bernama wajib pajak. Segenap pihak (persorangan atau lembaga) termasuk padanya pemugut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak dengan kewajiban dan hak perpajakan berkesesuaian aturan negara ialah termasuk pada golongan wajib pajak sebagaimana UU KUP, Pasal 1 angka 2 menyebutkan. Pajak memiliki beberapa peranan kepada negara, secara umum fungsi redistribusi, stabilitas, pengaturan, dan anggaran pendapatan ialah keempat kegunaan pajak.

Hubungan Pajak daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat

Penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah daerah sebagai tolok ukur dalam terwujudkan pembiayaan kegiatan pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan dan kepentingan dalam lingkup masyarakat. Pajak daerah dipergunakan dalam membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian Saragih (2018), menjelaskan bahwa didapati kepositifan pengaruh pada IPM oleh pajak daerah. Ditunjukkan pada temuan kajiannya, dalam taraf kepercayaan 5%, kebermaknaan dampak positif pada indeks pembangunan manusia oleh penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dipaparkan maka, peneliti melakukan pengajuan hipotesis:

H₁: Pajak Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten di Pulau Sulawesi tahun 2015-2018

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat

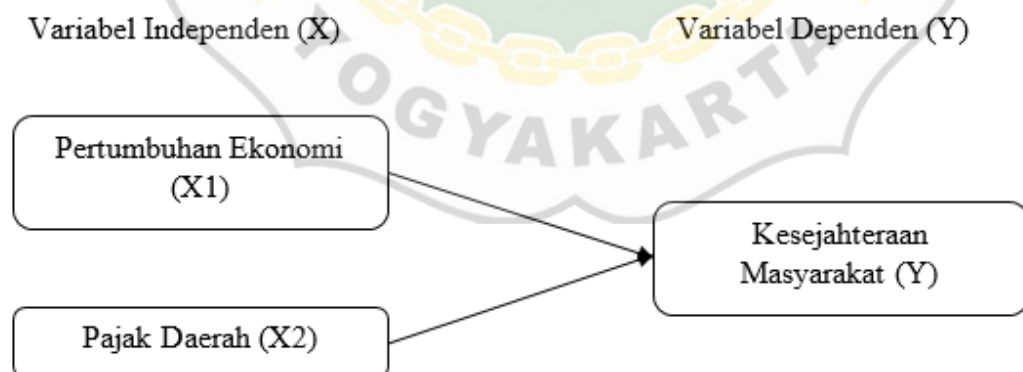
Pertumbuhan ekonomi terkait pada usaha meningkatkan penghasilan jasa dan produk pada aktivitas ekonomi kemasyarakatan yang mana pertumbuhan ekonomi menjadi bagian darinya. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pembangunan ekonomi diupayakan untuk menyediakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi kemiskinan (Baeti, 2013). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi dan berkelanjutan mengindikasikan kemajuan daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat berada pada penambahan pertumbuhan ekonominya. Pada penelitian Baeti (2013), dijelaskan kepositifan dampak signifikan pertumbuhan ekonomi dalam kurun masa 2007-2011 atas IPM di Jawa Tengah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan dipaparkan maka, peneliti melakukan pengajuan hipotesis:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten di Pulau Sulawesi tahun 2015-2018

Kerangka Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis dan penelitian telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian berbasis deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal tersebut dilakukan guna menguji benar atau tidaknya suatu teori atau dugaan sementara dalam sebuah penelitian (Sarmanu, 2017). Penelitian ini berfokus

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kesejahteraan Masyarakat

Sampel Penelitian

Yang dinamakan sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang mempunyai karakteristik (Sugiono, 2008). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Segecap kota/kabupaten pada sejumlah pada Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara ialah sampel yang disasar pada penerapan kajian dalam studi kali ini dalam pemberlakuan ketentuan kurun masa diantara tahun 2015 hingga 2018. Keseluruhan kabupaten sampel penelitian berjumlah 5 kabupaten pada Provinsi Gorontalo, 21 kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan, 15 kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tengah, 11 kabupaten pada Provinsi Sulawesi utara, dan 6 kabupaten pada Provinsi Sulawesi barat.

Sumber Data Penelitian

Pada kajian ini, dipilihlah penggunaan data bersifat kuantitatif dengan bersumber pada data sekunder. Bentuk dari jenis data ini ialah yang perwujudannya dalam sajian berupa angka. Lewat akses pada situs daring resmi Kementerian Keuangan dan BPS didapatkanlah himpunan data sekunder yang selanjutnya diolah pada proses analisis kajian ini.

Variabel Penelitian

1. Yang dinamakan Variabel independen yaitu sebuah variabel yang fungsinya untuk menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen juga dinamakan sebagai variabel sebab (Algifari, 2015:63). Pada penelitian ini Variabel independen (X) berupa Pajak Daerah (X1) dan Pertumbuhan ekonomi (X2).
2. Yang dinamakan Variabel dependen yaitu sebuah variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya salah satunya variabel independen. Variabel dependen bisa dinamakan sebagai variabel akibat (Algifari, 2015:63). Pada penelitian ini variabel dependen (Y) berupa Kesejahteraan Masyarakat.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan tingkat signifikansi 5% dan pengujian dua arah. Berikut hasil uji normalitas *Jarque-Bera*:

Tabel 1 Uji Normalitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jumlah data	276
Jarque-Bera	3,043
Probabilitas	0,218

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Berdasar hasil pengujian yang terdapat pada tabel 1 terlihat bahwa nilai probabilitas $0,226 >$ nilai signifikansi $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki fungsi untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 2 Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0,648696	Prob. F (5,270)	0,6627
Obs*R-squared	3,2762	Prob. Chi-Square (5)	0,6575
Scaled explained SS	2,945076	Prob. Chi-Square (5)	0,7085

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas chi-square (yang obs r squared) $0.65 < 0.05$ maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang terdapat pada persamaan model regresi linear pada periode observasi tertentu (t) dengan periode observasi sebelumnya (t-1). Hasil uji yang didapat ada pada tabel berikut:

Tabel 3 Uji Autokorelasi

F-statistic	0,031173	Prob. F (2,270)	0,969
Obs*R-squared	0,061367	Prob. Chi-Square (2)	0,97

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Dari hasil uji autokorelasi yang dilakukan, pada tabel 3, terlihat bahwa nilai *Obs *R-squared* sebesar $0,061367$ dengan probabilitas(Prob.) sebesar $0,9698$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan autokorelas terpenuhi.

Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ditemukannya interkolasi antar variabel eksogen pada model regresi. Hasil pengujian yang didapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Keterangan	PD	PE
PD	1	-0,025575
PE	-0,025575	1

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil uji yang dapat dilihat pada tabel 4, terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara Pajak Daerah (PD) dengan Pertumbuhan ekonomi adalah -0,025575 lebih kecil daripada 0,8. Dari hasil uji, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terbukti adanya masalah multikolinearitas

Pengujian Hipotesis

Uji regresi berganda merupakan uji yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis. Uji regresi berganda juga dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66,73845	0,09445	706,6329	0,000
PD	0,0000000000000000701	0,00000	3,174726	0,0017
PE	-0,044181	0,01219	-3,624323	0,0004

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian menghasilkan persamaan regresi berganda dapat dirumuskan:

$$KM = 66,73 + 0,0000000000000000701PD - 0,044PE + \varepsilon$$

Berdasarkan rumus diatas diketahui bahwa nilai *intercept* sebesar 66,73, artinya apabila variabel pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan atau penurunan, maka variabel tersebut tidak akan mempengaruhi nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 66,73. Nilai koefisien pada pajak daerah sebesar 0,0000000000000000701, artinya apabila terjadi peningkatan sebesar 1% pada variabel pajak daerah, maka akan terjadi peningkatan pada variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 0,0000000000000000701. Nilai koefisien pada pertumbuhan ekonomi sebesar -0,044, artinya apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel pertumbuhan ekonomi, maka akan berlaku penurunan sebesar 0,044 pada variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keterikatan variabel eksogen dan variabel endogen berdasar R^2 . Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Jumlah Data	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
276	0,956	0,941

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Berdasar hasil uji koefisien determinasi, tabel 6, nilai *adjusted R²* yang didapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adalah sebesar 0,941 atau 94,1%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 94,1702% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model persamaan pada penelitian ini.

Uji Simultan

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi secara bersamaan terhadap variabel dependen berdasar besarnya probabilitas f statistik. Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Simultan

Jumlah Data	F Statistik	Prob F Statistik
276	64,45953	0,0000

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Berdasar hasil uji simutan, pada tabel 7, terlihat bahwa nilai probabilitas f statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan variabel pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama(simultan) berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

Uji Parsial

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen secara sendiri- sendiri terhadap variabel endogen. Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

No	Hipotesis	T hitung	Koefisien regresi	p signifikansi	Prediksi	Temuan
1	Pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Sulawesi tahun 2015-2018	3.174	0.0000000000000000701	0.0017	Positif	Mendukung
2	Pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Sulawesi	-3,624	-0,044	0,0004	Positif	Menolak

Tabel 4.1 Hasil Uji Parsial

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews versi 9

Berdasar tabel 4.17, diketahui hipotesis satu dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pajak daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara positif. Hipotesis ini didasarkan pada hasil koefisien regresi sebesar 0.0000000000000000701 dan t hitung sebesar 3,174 lebih dari t tabel sebesar 1,650 dengan nilai signifikansi 0,0017 yang tidak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lebih dari 0,05. Berdasar hasil uji, keputusan pada hipotesis pertama diterima, artinya pajak daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lalu, hipotesis kedua diajukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Uji ini memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,044 dan t hitung sebesar -3,624 tidak lebih dari t tabel sebesar 1,650 dengan nilai signifikansi 0,0004 tidak lebih dari 0,05.

Berdasarkan hasil pada uji ini maka kesimpulannya adalah mendukung hipotesis pertama dan menolak hipotesis kedua, pajak daerah berpengaruh positif dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan adanya pengaruh positif oleh variabel pajak daerah terhadap variabel kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota pada Pulau Sulawesi dalam periode waktu 2015-2018. Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis dengan hasil yang diperoleh pada t hitung sebesar 3,174 yang mana lebih besar dibandingkan t tabel yaitu 1,650. Pengujian ini menghasilkan nilai signifikansi senilai 0,0017, nilai tersebut tidak lebih dari batas dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, sehingga hal tersebut mendukung hipotesis pertama. Berdasar hasil uji, dapat diartikan pengadaaan dan pengalokasian pajak daerah yang diberlakukan oleh pemerintah daerah telah terlaksana berbanding lurus prosedur yang ada dan hal tersebut telah terlaksana dengan optimal dan maksimal yang bertujuan untuk menghadirkan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat kabupaten.

Temuan diatas sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Saragih (2018), hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, penelitian dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2016, Saragih berpendapat keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan daerah bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak yang diterima untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang serupa juga terlihat pada penelitian Dewi dan Sri Budhi (2018) yang pada penelitiannya mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui optimalnya pembangunan daerah yang bisa meningkatkan lapangan kerja. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mdanat (2018) mengingatkan penerimaan pajak daerah tidak akan selalu berpengaruh positif, hal ini dapat terjadi ketika penerimaan pajak dialokasikan untuk pengeluaran yang tidak produktif.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Pulau Sulawesi periode tahun 2015-2018. Penarikan kesimpulan tersebut terlihat dari hasil pada uji yang menghasilkan nilai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

koefisien regresi sebesar -0,044 dan nilai t hitung sebesar -3,624, yang mana tidak melebihi t tabel sebesar 1,650. Uji nilai signifikansi memperoleh hasil sebesar 0,000 tidak melebihi nilai batas 0,05, maka hasil tersebut menolak hipotesis dua. Hasil pengujian ini berarti tugas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum terlaksana dengan efektif dan efisien. Kondisi ini bisa terjadi disebabkan oleh disparitas ekonomi sehingga terdapat ketimpangan pendapatan masyarakat dan ketidakmerataan kegiatan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa fasilitas dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat belum sama atau merata sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah dan Kustanto (2017) sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif oleh variabel PE (pertumbuhan ekonomi) pada variabel kesejahteraan masyarakat namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo perlu melihat faktor di luar pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat tercipta. Penelitian sebelumnya ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Awandari dan Indrajaya (2016). Pada penelitian mereka, terlihat adanya pengaruh positif dan signifikan yang dihasilkan oleh variabel pertumbuhan ekonomi pada variabel kesejahteraan masyarakat. Hasil ini mengatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Namun hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2016) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk melihat pengaruh pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Sulawesi dalam periode waktu 2015-2018. Berdasarkan berbagai hasil pengujian yang telah penulis uji, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Sulawesi dalam periode waktu 2015- 2018. Kesimpulan ini diambil dari hasil dari pengujian yang sebelumnya telah penulis lakukan. Hasil pada uji parsial menunjukkan variabel pajak daerah memiliki nilai koefisien regresi senilai 0.00000000000000000701 memiliki nilai positif dan t hitung sebesar 3,174 yang lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,650 dengan nilai signifikansi hasil 0,0017 dan tidak melebihi batas signifikansi yaitu 0,05. Hasil ini diartikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam melakukan reformasi pajak daerah dan pajak daerah yang diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah kepada masing-masing daerah telah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah terlaksana secara optimal dan efektif yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat kabupaten.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki pengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat kabupaten pada Pulau Sulawesi dalam periode waktu 2015-2018. Penarikan kesimpulan ini diambil dari hasil uji yang telah penulis lakukan sebelumnya. Pada uji parsial sebelumnya didapatkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,044 dan t hitung sebesar -3,624, tidak melebihi t tabel sebesar 1,650 dengan nilai signifikansi hasil 0,476 yang melebihi tingkat signifikansi yaitu 0,05. Hasil diatas menunjukkan bahwa tugas pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Kondisi ini bisa terjadi disebabkan oleh disparitas ekonomi sehingga terdapat ketimpangan pendapatan masyarakat dan ketidakmerataan kegiatan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa fasilitas dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat belum sama atau merata sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian

Pada saat melaksanakan penelitian ini penulis menemui beberapa keterbatasan yaitu:

1. Minimnya jurnal referensi yang terkait dengan variabel-variabel yang dibutuhkan penulis khususnya pada variabel bebas yaitu pajak daerah
2. Terdapat data pada laporan yang tidak memiliki nilai, sehingga dianggap tidak valid atau tidak dapat digunakan
3. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup 1 pulau yang terdiri atas 5 provinsi sehingga kurang mencerminkan seluruh kabupaten di Indonesia

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait adalah berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah pada Pulau Sulawesi diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini wewenang dan tugas yang dimiliki pemerintah daerah tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Semakin baik kinerja pemerintah daerah semakin meningkat kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat kabupaten. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan cara meningkatkan PDRB daerah yang bertujuan untuk memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Peneliti Berikutnya
Saran bagi peneliti berikutnya adalah untuk memperdalam variabel bebas pajak daerah yang digunakan agar lebih mengetahui secara spesifik jenis pajak yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap sehingga data dapat lebih dipercaya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan agar dapat memperluas lagi ruang lingkup penelitian sehingga hasil penelitian yang didapatkan mumpuni untuk mencerminkan keseluruhan kabupaten yang ada di Indonesia

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1435–1462.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika otonomi daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1), 1–11.
- Baharuddin. (2015). Akuntabilitas pelayanan publik: Studi kasus pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kota Makassar. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 263–270.
- BPS. (2009). *Badan pusat statistik Indonesia*.
- Dewi, D. S. K., & MAP. (2013). Penerapan prinsip-prinsip citizen's charter dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Aristo*, 1(2), 19–36.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of village fund allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283–295.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44328.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Manggala, G. D. (2019). Pengaruh Dana Desa (DD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *JEBSIS-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 1(1), 1-7.

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).

Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 25-34.

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Algifari. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Subiyakto, H., & Algifari. (2011). *Praktikum Statistika dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIE YKPN.

<http://www.bps.go.id/> Diakses 28 Maret 2021

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



repository.stieykpn.ac.id